



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Pilar-Pilar Poros Maritim Indonesia: Kerjasama Pengamanan Perairan Selat
Malaka sebagai Respon Terhadap Perompakan dan Pembajakan (2014-
2019)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Adinda Delina Budyanto

2015330131

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Pilar-Pilar Poros Maritim Indonesia: Kerjasama Pengamanan Perairan Selat
Malaka sebagai Respon Terhadap Perompakan dan Pembajakan (2014-
2019)**

Skripsi

Oleh

Adinda Delina Budyanto

2015330131

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

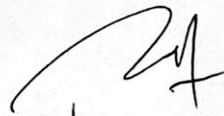


Tanda Pengesahan Skripsi

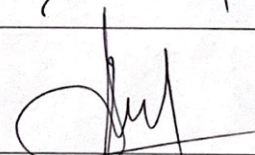
Nama : Adinda Delina Budyanto
Nomor Pokok : 2015330131
Judul : Pilar-Pilar Poros Maritim Indonesia: Kerjasama Pengamanan Perairan Selat Malaka sebagai Respon Terhadap Perompakan dan Pembajakan (2014-2019)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 08 Januari 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

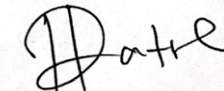
Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

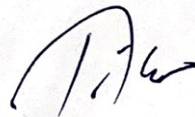
Sekretaris
Dr. I Nyoman Sudira

: 

Anggota
Ratih Indraswari, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adinda Delina Budyanto

NPM : 2015330131

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Kerja Sama Dalam Pengamanan Perairan Selat Malaka Terhadap Perompakan dan Pembajakan Dengan Diberlakukannya Patroli Terkoordinasi Trilateral Malaysia-Singapura-Indonesia (2014-2019)

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Penyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 17 Desember 2019



Adinda Delina Budyanto

ABSTRAK

Nama : Adinda Delina Budyanto
NPM : 2015330131
Judul : Pilar-Pilar Poros Maritim Indonesia: Kerjasama Pengamanan Perairan Selat Malaka sebagai Respon Terhadap Perompakan dan Pembajakan dengan (2014-2019)

Kondisi geografis Indonesia yang strategis dalam hal perairan bisa menjadi keuntungan dan permasalahan, kejahatan maritim seperti perompakan dan pembajakan adalah sebagian contoh dari permasalahan yang ada. Selat Malaka sebagai salah satu perairan yang dimiliki Indonesia juga tidak luput dari serangan perompakan dan pembajakan, hal ini didukung dengan keberadaan Selat Malaka sebagai salah satu jalur perdagangan yang penting di dunia. Dengan adanya kasus perompakan dan pembajakan di Selat Malaka tentunya bisa merugikan Indonesia baik itu dari sisi internal negara maupun eksternal seperti hubungan dengan negara-negara lain yang menjadi buruk karena terjadinya kasus tersebut. Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki visi misi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim Indonesia melalui program Nawa Cita. Keberhasilan dari program Nawa Cita tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan serta keamanan nasional Indonesia maupun dunia. Kelima poros maritim memiliki peran dalam penanganan ancaman yang ada, diantaranya diplomasi maritim dan penguatan keamanan maritim.

Kata Kunci: Selat Malaka, Poros Maritim Indonesia, Keamanan Nasional, Perompakan dan Pembajakan, Kerjasama.

ABSTRACT

Name : Adinda Delina Budyanto
Student ID : 2015330131
Title : Indonesian Maritime Pillars: Cooperation in Securing Malacca Straits as a respond towards Sea Robbery and Piracy (2014-2019)

Indonesia's strategic geographical condition can be both a blessing or a curse, maritime crime such as sea robbery and piracy. Malacca strait as one of the busiest trade route is not an exception from sea robbery and piracy. The Sea Robbery and Hijacking that occurred in Malacca Strait region can be disastrous for Indonesia, and it's affecting the internal and external, it's also makes Indonesia's relation with other country. Indonesia under Joko Widodo as the President of Indonesia had a vision to make Indonesia as a country that's really strong and capable as World's Maritime Axis. The successness of Nawa Cita program will affect Indonesia's welfare also Indonesia's National Security, even globally. In this thesis, the writer will write about how the pillars of World's Maritime Axis can help Indonesia to fight against the Sea Robbery and Piracy. The Trilateral Coordinated patrol play an important role as a pushing factor that makes the World's Maritime Axis policy went well so far. All of the pillars has it own role to handle the threat, Maritime Diplomacy and strengthening maritime security are part of the important pillars to cover this issue.

Keywords: Malacca Strait, Maritime Axis, National Security, Sea Robbery and Piracy, Cooperation.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pilar-Pilar Poros Maritim Indonesia: Kerjasama Pengamanan Perairan Selat Malaka sebagai Respon Terhadap Perompakan dan Pembajakan (2014-2019)”** ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan Skripsi. Penulis berharap Skripsi ini dapat memberi wawasan serta manfaat bagi pembaca.

Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata-1 (Sarjana) di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis terbuka terhadap kritik maupun saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna meningkatkan dan memperbaiki kapabilitas penulisan serta pengolahan informasi, serta untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada siapapun yang selalu memberi semangat dan mengingatkan saya untuk
terus berjuang

Kepada Tuhan YME,

Atas anugerah dan berkah yang selalu diberikan kepada saya. Khususnya diberikan kemampuan dan penguatan dalam mengerjakan skripsi ini. God is good.

Kepada Mama, Papa, dan Nanda

Terima kasih banyak untuk setiap semangat yang diberikan, pengertian yang selalu diberikan walaupun saya sempat extend skripsi tapi kalian setia menunggu dan dengan sabar memberi dukungan positif. Sekali lagi terima kasih khususnya Mama dan Nanda yang ada di masa-masa sulit selama ini.

Untuk papaku tersayang, akhirnya skripsi Dinda selesai pa. Papa juga paham betul bagaimana Dinda berusaha menyelesaikan studi Dinda. Terima kasih atas “kehadirannya” disaat Dinda betul-betul jenuh dalam mengerjakan skripsi ini, wish you were here.

Kepada Mas Nyoman

Terima kasih banyak Mas Nyoman untuk ilmu-ilmu yang diberikan selama masa studi, walaupun kata mas otak saya seperti kapur dalam menyerap ilmu tapi tenang saja mas banyak yang saya dapatkan dan saya pelajari dari Mas Nyoman. Terima kasih untuk kesediaannya membimbing saya selama dua semester ini walaupun saya banyak ngilang ya mas.

Kepada Muhammad Rafly Andritia Pratama

Terima kasih Rafly sudah menemani dari proses awal pembuatan skripsi ini. Jauh-jauh dari Bogor sampai akhirnya sekarang sudah menetap di Bandung tetap dengan sabar menemani setiap proses yang ada. Terima kasih banyak karena selalu mengingatkan bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja dan terima kasih untuk selalu mengingatkanku bahwa aku mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mau diajak berbagi tangis dan tawa seputar skripsi selama ini.

Kepada Sahabat-sahabat yang Selalu Hadir

Kepada Syana Akbar, Anastasia Akira, Zefanya Natasha, Sabna Adam, Thea Renata, Dodit Soegondo, Grady Carlogarbo yang selalu hadir untuk menyemangati dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk setiap kekonyolan yang ada sehingga membuatku sadar bahwa masih ada yang bisa dijadikan bahan tertawa.

Kepada Eugenia sahabat seperjuanganku, akhirnya kita diizinkan untuk tiba di saat-saat seperti ini ya. Dari semester satu hingga extend skripsi dua semester, terima kasih.

Kepada Orang-orang yang Tidak Dapat Saya Sebutkan Satu-satu

Terima kasih untuk siapapun kalian atas doa dan semangat yang selalu diberikan dalam penyelesaian skripsi ini, tanpa doa dari kalian sayapun tidak bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah berbagi suka dan duka bersama.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	5
1.2.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
1.4 Kajian Literatur	8
1.5 Kerangka Pemikiran	10
1.6 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data.....	16
1.6.1 Metode Penelitian	16
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.7 Sistematika Penulisan	17
BAB II PEROMPAKAN DAN PEMBAJAKAN DI SELAT MALAKA.....	20
2.1 Potensi Ancaman di Selat Malaka Bagi Negara-Negara Pantai Pemilik dan Negara Pengguna	21
2.2 Perompakan dan Pembajakan Sebagai Bentuk Kejahatan yang Mengancam Keamanan Maritim	25
2.2.1 Peran Indonesia dalam Menjaga Keamanan Selat Malaka dari Kejahatan Maritim.	28
2.3 Mekanisme Kerjasama di Selat Malaka.....	29
2.3.1 Patroli Terkoordinasi MALSINDO	32
2.3.2 Pelayanan Panduan di Selat Malaka	33
BAB III PERWUJUDAN PILAR-PILAR POROS MARITIM DALAM MENANGANI PERMASALAHAN PEROMPAKAN DAN PEMBAJAKAN DI SELAT MALAKA	30

3.1	Kebijakan Poros Maritim dan Keamanan nasional.....	31
3.1.1	Pilar-pilar Kebijakan Poros Maritim Sebagai Kepentingan Nasional	31
3.1.2	Keamanan Nasional Indonesia.....	36
3.2	Dua Sisi Kebijakan Poros Maritim.....	38
BAB IV	45
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR SINGKATAN

AL	: Angkatan Laut
ALKI	: Alur Laut Kepulauan Indonesia
AS	: Amerika Serikat
BAKAMLA	: Badan Keamanan Laut
EAS	: East Asia Summit
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
IMB	: International Maritime Bureau
IMO	: International Maritime Organization
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MALSINDO	: Malaysia, Singapura dan Indonesia
MILF	: Moro Islamic Liberation Front
MSP	: Malacca Strait Patrol
SOP	: Standard Operation Procedure
TNI	: Tentara Negara Indonesia
TOR JCC	: Term of Reference Joint Coordinating Committee
TTEG	: Tripartite Technical Expert Group
UNCLOS	: United Nations Convention on the Law of The Sea
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perairan Selat Malaka merupakan salah satu dari sekian jalur pelayaran yang penting untuk menunjang perekonomian di dunia, selat ini terletak diantara batas-batas wilayah dari Negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Jalur ini merupakan jalur yang dianggap strategis karena bisa menghemat waktu dan juga biaya dalam perdagangan. Dengan keberadaannya sebagai salah satu jalur perdagangan yang penting di dunia¹, Perairan Selat Malaka juga memiliki beberapa factor salah satunya kasus perompakan atau pembajakan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan baik itu bagi Indonesia, Malaysia, dan Singapura maupun negara-negara yang kapalnya melintas di jalur Perairan Selat Malaka². Pembajakan maupun perompakan di Perairan Selat Malaka juga disebabkan kondisi Perairan Selat Malaka yang tergolong sempit dan dangkal untuk dilalui kapal-kapal besar dan bermuatan banyak, terhitung ada sekitar 21 titik rawan di Perairan Selat Malaka yang disebabkan dangkalnya perairan³, hal ini tentunya dapat mempengaruhi kapal-kapal yang melintasi Perairan Selat Malaka sehingga harus berlayar dengan kecepatan rendah dengan kondisi seperti inilah pembajakan maupun perompakan biasa terjadi karena pada umumnya pelaku melakukan aksinya dengan

¹ “*Strait of Malacca*”. Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA), 2013. <http://www.pemsea.org/profile/pollution-hotspots/malaccastraits>, diakses pada 11 Juni 2019.

² Achmad Insan Maulidy, “*Kerjasama Keamanan Indonesia, Malaysia, Singapura Dalam Mengatasi Masalah Pembajakan di Perairan Selat Malaka*”, Skripsi Sarjana Ilmu Sosial, UIN, 2011.

³ Kirdi Dipoyudo, “*Persoalan di Sekitar Selat Malaka*”, Jakarta: Analisa CSIS, tahun 1975.

menggunakan speed boat yang jauh lebih cepat dari kapal-kapal bermuatan barang tersebut.⁴

Kasus seperti perompakan dan pembajakan ini mendorong Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk membentuk patrol terkoordinasi, dengan adanya MALSINDO Trilateral Coordinated Patrol pada tahun 2004 dan penandatanganan Standard Operation Procedure (SOP) dan juga Term of Reference Joint Coordinating Committee (TOR JCC) pada tanggal 21 April 2006.⁵ Malaysia, Singapura juga Indonesia melakukan kerjasama tersebut guna mengamankan Perairan Selat Malaka dari aktivitas pembajakan maupun perompakan. Kerjasama ini didasari oleh kepentingan nasional serta merupakan bentuk dari politik luar negeri masing-masing negara⁶. Kerjasama patrol terkoordinasi ini melibatkan TNI Angkatan Laut, Royal Singapore Navy dan Tentara Laut Diraja Malaysia. Bentuk nyata dari kerjasama yang terus dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura adalah Malacca Straits Sea Patrol (2004), “Eyes-in-the-Sky” combined maritime air patrols (2005) dan program-program yang ada inipun terus berlanjut guna meningkatkan keamanan di Perairan Selat Malaka dengan melakukan patrol yang terkoordinasi dan juga saling bertukar informasi yang sifatnya intelijen.⁷ Kondisi Perairan Selat Malaka yang strategis namun rawan inilah yang mendorong terbentuknya kerjasama ini.⁸

⁴ Graham Gerard, “*Maritime Terrorism and Securing the Malacca Straits*”, 168.

⁵ Chen Wei Li, “*Keeping Watch Over The Malacca Straits*”. MINDEF (Ministry Of Defence), 21 April 2006. http://www.mindef.gov.sg/imindef/resourcelibrary/cyberpioneer/topics/articles/news/2006/April/21apr06_news.print.img.html, diakses pada 11 Juni 2019.

⁶ Makmur Keliat, “*Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.

⁷ “*The Malacca Straits Patrol*”. MINDEF (Ministry Of Defence), 21 April 2015. <https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and-events/latest-releases/article-detail/2016/april/2016apr21-news-releases-00134/>, diakses pada 11 Juni 2019.

⁸ Makmur Keliat, *Op cit*.

Presiden Joko Widodo dalam program utamanya “Nawa Cita” menyebutkan akan menunjukkan kembali eksistensi Indonesia sebagai negara maritim, program ini didasari kepada keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan yang kondisinya 2/3 air sehingga hal ini seharusnya menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki potensi besar di perairan . Hal ini dibuktikan lebih lagi ketika Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) East Asia Summit (EAS) yang ke-9 pada tanggal 13 November 2014 yang bertempat di Nay Pyi Taw, Myanmar dimana dalam pidatonya Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sangat diperlukan pembangunan berbasis laut dimana ada 5 pilar utama yaitu: (1)Membangun kembali budaya maritim Indonesia agar bangsa Indonesia kembali ingat akan keberadaan jaya maritim negara ini di masa lalu, (2)Menjaga sumber daya laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama, (3)Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistic, industry perkapalan, dan pariwisata maritim, (4)Menerapkan diplomasi maritim melalui usulan peningkatan kerja sama dibidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan, (5)Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim dengan keberadaan TNI AL sebagai pendukung utama keamanan maritim.⁹

⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “*Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*”, 15 November 2014.

1.2 Identifikasi Masalah

Perairan Selat Malaka yang dianggap sebagai salah satu jalur perdagangan yang strategis di dunia tentunya tidak mungkin terlepas dari ancaman keamanan. Gangguan-gangguan seperti pembajakan kapal dan juga perompakan dengan menggunakan senjata marak terjadi di Perairan Selat Malaka, hal ini disebabkan topografi Perairan Selat Malaka yang sempit, dangkal dan berkelok hal ini memicu terjadinya serangan bersenjata bagi kapal-kapal yang melintasi Perairan Selat Malaka.¹⁰ Dilaporkan juga oleh International Maritim Bureau bahwa intensitas kejadian perampokan bersenjata yang paling banyak terjadi di Asia Tenggara ada di perairan Perairan Selat Malaka.¹¹

Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya Patroli Terkoordinasi dari negara-negara pantai pemilik Perairan Selat Malaka. Pada tahun 2004 dibentuklah kerjasama trilateral antara Malaysia-Singapura-Indonesia dalam mengamankan Perairan Selat Malaka, padahal kasus perompakan dan pembajakan sudah terjadi dari tahun 1992. Pasca kejadian 9/11 juga menjadi salah satu factor dari terbentuknya Malacca Strait Patrol, negara pengguna Perairan Selat Malaka meminta agar Malaysia-Singapura-Indonesia segera meningkatkan keamanan di sekitar Perairan Selat Malaka¹² dianggap sebagai langkah yang tepat dalam mengamankan Perairan Selat Malaka , agar menciptakan rasa aman untuk berlayar di Perairan Selat Malaka.¹³

¹⁰ Kirdi Dipoyudo, *Op cit.*

¹¹ UNODC, *ICC International Maritime Bureau Piracy and Armed Robbery against Ships*, annual reports from 2003-2009.

¹² Bill Tarrant, *Balancing Powers in The Malacca Strait*, Global News Journal, 2010.

¹³ Ida Bagus Sanubari, “*Meningkatkan Pengamanan Selat Malaka Guna Mencegah Internasionalisasi Asing Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI*”, Kertas karya perorangan, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2005.

Patrol terkoordinasi ini juga diperlukan guna mencapai visi dari Presiden Joko Widodo terkait Indonesia sebagai poros maritim dunia yang disebutkan dalam 5 pilar utama pembangunan khususnya pada poin pilar (4) Menerapkan diplomasi maritim melalui usulan peningkatan kerja sama dibidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan dan (5) Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.¹⁴

1.2.1 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis membatasi masalah pada penanganan kasus pembajakan di wilayah Perairan Selat Malaka yang dapat menghambat tujuan Indonesia sebagai poros maritim dunia serta usaha yang dilakukan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla pada tahun dalam mencapai kepentingannya di Perairan Selat Malaka. Tahun 2014-2019 dipilih tidak hanya karena periode jabatan presiden selama lima tahun namun pada tahun ini juga kasus perompakan dan pembajakan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Topik ini dipilih karena kasus perompakan ini merupakan yang cukup sering terjadi dan mempengaruhi pembangunan berbasis laut dan dapat menghambat perekonomian juga mengganggu keamanan yang ada di Perairan Selat Malaka.¹⁵ Dalam membahas kasus perompakan di Perairan Selat Malaka ini, diperlukan penanganan khusus oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, TNI Angkatan Laut serta

¹⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Op cit.*

¹⁵ Ida Bagus Sanubari, *Op cit* 52.

pihak-pihak bertanggung jawab lainnya baik itu dari Malaysia maupun Singapura. Akan dibahas lebih spesifik lagi sesuai dengan apa yang ada didalam salah satu pilar utama pembangunan berbasis laut yang merupakan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo, yaitu pilar (4) Menerapkan diplomasi maritim melalui usulan peningkatan kerja sama dibidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan dan (5) Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.¹⁶

1.2.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan lebih fokus kepada tindakan Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo sebagai salah satu dari negara pantai pemilik Perairan Selat Malaka. Bagaimana Indonesia menghadapi permasalahan perompakan dan pembajakan yang ada di Perairan Selat Malaka, bagaimana Indonesia menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara pemilik kepentingan lainnya serta apa yang menjadi kepentingan Indonesia untuk berperan aktif di Perairan Selat Malaka. Maka dari itu, pertanyaan penelitian dari essay ini adalah **“bagaimana Indonesia menguatkan pilar-pilar poros maritim sebagai respon terhadap perompakan dan pembajakan di Selat Malaka?”**

¹⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Op cit.*

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan kemandirian Selat Malaka serta peran aktif Indonesia dalam menjaga keamanan di sekitar perairan Selat Malaka sebagai pihak yang terlibat menangani kasus perompakan maupun pembajakan yang terjadi di Perairan Selat Malaka pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu bentuk nyata dari perwujudan cita-cita dan harapan Indonesia sebagai poros maritim dunia terutama dalam merealisasikan pilar-pilar poros maritime yang berkenaan dengan kerjasama dan peningkatan keamanan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran aktif Indonesia dalam menjaga keamanan Perairan Selat Malaka. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai kepentingan praktis bagi para pembaca yaitu untuk memberikan informasi bagaimana peran aktif Indonesia melalui TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia meningkatkan pertahanan maritim guna mewujudkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo terkait penetapan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan menjalankan pilar-pilar poros maritim yang ada.

1.4 Kajian Literatur

Buku: “Indonesian Sea Power” oleh Dr. Marsetio ,M.M.

Buku yang ditulis oleh Dr. Marsetio yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Laut dapat digunakan untuk mengidentifikasi sejarah maritim Indonesia serta seberapa besar kekuatan laut yang dimiliki oleh Indonesia. Maritim merupakan identitas bagi Indonesia, bahkan sejak jaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya dimana Indonesia paling unggul dalam jalur perdagangan di air serta keamanan di air. Pada deklarasi Juanda juga disebutkan Indonesia sebagai negara kepulauan, dimana hal ini juga diakui oleh United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan Zona Ekonomi Eksklusif terluas yang ada di dunia.¹⁷ Dengan adanya data yang disajikan didalam buku ini, penulis dapat mengeksplorasi lebih jauh kekuatan maritim Indonesia itu sendiri.

Jurnal “Threat Convergence, Transnational Security Threats in the Straits of Malacca” oleh Felipe Umaña

Tulisan yang berjudul Threat Convergence, Transnational Security Threats in the Straits of Malacca yang dikeluarkan the Fund for Peace Publication. Tulisan ini membahas bagaimana isu transnasional telah membawa efek negatif dan mempengaruhi keamanan di Perairan Selat Malaka. Kejahatan transnasional yang terjadi di Perairan Selat Malaka ini identik dengan kejahatan yang terjadi di Somalia sehingga tidak hanya mengancam keamanan negara akan tetapi lebih dari itu juga mengancam perekonomian negara – negara pantai sekitar Perairan Selat Malaka.

¹⁷ Dr. Marsetio, *Indonesian Sea Power* (Jakarta: Indonesia Defense University, 2014).

Oleh karena itu tiga negara pantai Perairan Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura memerangi kejahatan transnasional ini. Kejahatan transnasional yang dimaksud yaitu Maritime Piracy and Armed Robbery. Selain melakukan kerja sama trilateral, ketiga negara tersebut juga sepakat untuk meningkatkan kapasitas negara masing – masing untuk meminimalisir permasalahan ini¹⁸

Jurnal “Kebijakan Poros Maritim dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan dan Harapan” oleh Safril Hidayat dan Ridwan

. Dalam jurnal ini dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan masih harus mempersiapkan diri lebih lanjut lagi untuk menjadi poros maritim dunia, hal ini dikarenakan masih banyak kerawanan yang terjadi di perairan sekitar Indonesia baik itu dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun oleh Warga Negara Asing. Dengan program nawa cita yang digagas oleh Presiden Joko Widodo sangat penting untuk memperhatikan kepentingan nasional Indonesia, isi kebijakan dan lingkungan dari kebijakan itu sendiri, hal ini diharapkan mampu membawa kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat Indonesia.¹⁹ Dengan adanya jurnal ini diharapkan bisa menjadi referensi penulis dalam mengetahui bagaimana kebijakan nawacita Joko Widodo yang diantaranya adalah lima pilar maritim dapat mempengaruhi keadaan keamanan yang ada di perairan Selat Malaka serta mengatasi ancaman-ancaman yang ada.

Jurnal “Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka” oleh M. Saeri

¹⁸ Felipe Umaña, *Threat Convergence Transnational Security Threats in the Strait of Malacca* (Washington DC: The Fund for Peace, 2012), 5.

¹⁹ Safril Hidayat dan Ridwan, “Kebijakan Poros Maritim dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan dan Harapan”, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* (2017).

Jurnal yang ditulis oleh Saeri bertujuan untuk menjelaskan apa saja tantangan yang ada di Perairan Selat Malaka. Tantangan tersebut yaitu menyelesaikan permasalahan batas negara yang tumpang tindih antara negara pantai serta masalah perompakan juga pembajakan di laut. Menurut Saeri ancaman serangan perompak di Perairan Selat Malaka ini terjadi dikarenakan adanya kelemahan negara – negara pantai dalam meredam masalah tersebut.²⁰

Keadaan geografis perairan Selat Malaka yang cukup rumit menjadi salah satu alasan mengapa perompakan dan pembajakan masih sulit untuk di tangani. Terlebih dengan keberadaan perompak dan pembajak yang memanfaatkan kapal-kapal kecil untuk menjarah kapal-kapal besar. Tulisan ketiga ini lebih menekankan bagaimana situasi geografi dan geostrategi wilayah Perairan Selat Malaka. Point ini akan digunakan penulis untuk menjelaskan karakteristik wilayah Perairan Selat Malaka itu sendiri.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk dapat menjelaskan permasalahan yang telah dirumuskan dan dijelaskan sebelumnya maka dibutuhkan teori juga konsep untuk membantu menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada. Tidak hanya teori dan konsep, penulis juga menggunakan pendapat-pendapat dari para ahli untuk mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan satu teori Hubungan Internasional dan beberapa konsep yang berkaitan dengan fenomena yang ada.

Kepentingan nasional merupakan suatu tujuan yang mendasar dan sebagai penentu utama yang mendasari para pembuat keputusan dalam membuat sebuah

²⁰ M. Saeri, “*Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka*”, *Jurnal Transnasional*, vol 4, no 2, (2013).

kebijakan berupa politik luar negeri. Kepentingan nasional suatu Negara khas dengan konsep umum yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang paling penting bagi sebuah Negara. Di dalamnya terdapat penjagaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, integritas teritorial, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Dikarenakan tidak adanya kepentingan tunggal yang mendominasi pembuatan keputusan pemerintah, konsep tersebut mungkin lebih tepat disebut secara jamak sebagai kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri sebagai dasar sebuah Negara semata-mata berlandaskan kepentingan nasional.²¹

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. H.J. Moergenthau menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol atas suatu negara terhadap negara lain, sehingga dengan adanya power suatu negara akan bertahan hidup (survive). Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik paksaan, atau kerjasama (cooperation). Karena itu, kekuasaan nasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional²²

Menurut undang-undang nomor 3 tahun 2003 tentang pertahanan negara yang dimaksud dengan ancaman. Adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan negara. Yang mempengaruhi ancaman

²¹Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi.2012.*International Relations and World Politics, "How To Think About National Security".*hal 186-187

²² Sitepu, P.A. 2011. *Studi Hubungan Internasional*.hal 163

menurut John Collins adalah: kemampuan, intensitas dan kemudahan untuk dapat diserang. Menurut Barry Buzan, ancaman dapat meliputi aspek:

1. Ancaman Sosial: Ancaman yang dapat menyerang ranah sosial seperti kultur, kebiasaan sehari-hari, bahasa, agama maupun kepercayaan yang ada.
2. Ancaman Militer: Ancaman terhadap kapabilitas militer negara yang dapat berupa ancaman yang sifatnya defensif maupun ofensif.
3. Ancaman Politik: Ancaman terhadap stabilitas negara, sistem pemerintahan yang ada sehingga dapat mempengaruhi ideologi yang ada dan legitimasi kekuasaan pada pemerintahan yang ada.
4. Ancaman Ekonomi : Ancaman yang bisa menyerang stabilitas negara melalui akses terhadap sumber daya yang ada, keuangan maupun pasar yang dapat membantu menjaga stabilitas negara dan memegang hal penting dalam aspek perekonomian.
5. Ancaman Ekologi : Ancaman Ekologi atau Ancaman Lingkungan merupakan bentuk gangguan terhadap kestabilan alam yang dapat menunjang kehidupan yang ada dan dapat berpengaruh terhadap banyak aspek keamanan yang lainnya.²³

Banyak negara yang menjadikan sektor kemaritiman sebagai kepentingan nasionalnya, sehingga meningkatkan teknologi dan ilmu pengetahuan guna mempertahankan keamanan maritimnya. Pemerintahan Indonesia, dibawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini berangkat dari kondisi geografis Indonesia yang sebagian

²³ Barry Buzan, *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations* (Wheatsheaf Books LTD, 1983), 30-34.

besar wilayahnya merupakan perairan serta letak strategis Indonesia yang berada diantara dua samudera. Hal ini membuat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sadar akan potensi laut Indonesia serta membentuk adanya konsep amritim dan dapat menentukan arah bangsa Indonesia kedepannya akan seperti apa. Ada 5 pilar utama yang digagas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu: (1)Membangun kembali budaya maritim Indonesia, (2)Menjaga sumber daya laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama, (3)Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistic, industry perkapalan, dan pariwisata maritim, (4)Menerapkan diplomasi maritim melalui usulan peningkatan kerja sama dibidang maritim dan upaya menangani sumber konflik,seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan, (5)Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.²⁴

Perompakan pada dasarnya adalah kejahatan yang di motivasi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan bentuk-bentuk terorisme maritim adalah sebuah aksi terror yang di motivasi oleh tujuan-tujuan politik di luar sasaran-sasaran maritim langsung. Meskipun demikian , keduanya tetap di anggap bagian dari masalah keamanan maritim regional. Konsep kompleks keamanan regional dari Barry Buzan (2000) mungkin dapat di gunakan untuk memahami persoalan terorisme maritim.Menurut Buzan keamanan merupakan "... human collectivities that are affected by military, political, economic, societal and

²⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Op cit.*

environmental factors”. Terdapat kesalingketergantungan antara aktor-aktor tersebut di kawasan yang oleh Buzan di sebut sebagai kompleks keamanan. Buzan mendefinisikan kompleks keamanan sebagai “a group of states whose primary security concerns link together sufficiently closely that their national securities cannot be realistically considered apart from one another”.

Menurut Geoffrey Till, definisi dari keamanan maritim itu dapat dikatakan sebagai hal yang situasional, tergantung pada perspektif yang digunakan untuk melihat hal itu. Keamanan maritim bukanlah konsep maupun teori khusus dalam kajian keamanan, tetapi merupakan bagian yang penting dari kajian keamanan karena keamanan maritim meruoakan bagian dari strategi keamanan negara dan masuk dalam kepentingan nasional dari banyak negara. Keamanan maritim membahas bagaimana menata keamanan, keseimbangan dan kestabilan di laut dari berbagai aspek. Kemanan maritim juga merupakan kondisi aman di wilayah perairan dunia, baik itu bagi negara pemilik maupun negara pengguna perairan tersebut. Untuk menjaga keamanan maritim juga diperlukan strategi maritim yang bertujuan untuk memperoleh kontrol atas wilayah laut.²⁵ Walaupun tidak ada definisi resmi mengenai arti dari keamanan maritim, namun ada beberapa komponen yang diyakini bisa menyebabkan ketidakstabilan di wilayah perairan dunia. Isu yang ditangani oleh keamanan maritim adalah: (1) tindakan terorisme untuk melawan kapal yang sedang berlayar, (2) pembajakan dan perompakan, (3) penyelundupan obat-obat terlarang.

Selain itu keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut aman dan bebas dari ancaman berupa pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional dan

²⁵ Geoffrey Till, “*Naval War College Review Vol 60 No.4: New Directions in Maritime Strategy*”, 2007, 30.

internasional yang berlaku di wilayah perairan, serta ancaman terhadap keamanan negara perilaku subjek hukum dilaut yang berpotensi mengancam keamanan negara atau disintegrasi wilayah negara. Dari perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional, dapat di identifikasikan adanya berbagai bentuk ancaman, yaitu ancaman potensial yang bersumber dari masalah batas wilayah perairan yuridiksi nasional, masalah penyalahgunaan alur laut kepulauan Indonesia, masalah sumberdaya alam dan energy, serta ancaman factual berupa kegiatan perikanan illegal, penyelundupan, perompakan, pencurian harta karun, pelanggaran wilayah, pelanggaran imigrasi, penelitian ilmiah tanpa izin, serta pelanggaran terhadap lingkungan laut. Keamanan perairan Selat Malaka sangat penting dan pengaruh besar bagi ketiga negara, Oleh karena itu diperlukan kerjasama keamanan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini perlunya penjagaan keamanan yang ketat di perairan selat malaka dikarenakan sebagai jalur perdagangan nasional bahkan internasional Selat Malaka sangat riskan dengan perompakan bersenjata oleh para perompak dan para pelanggar batas wilayah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perlunya kerjasama negara-negara pantai di bidang militer untuk menjaga keamanan perairan selat malaka.

Semakin ramainya jalur perdagangan laut juga mendorong terjadinya tindak kejahatan di perairan. Kondisi perekonomian yang lemah, keterbatasan sumber daya alam di suatu negara serta lemahnya peran pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan warga negaranya, seperti yang dikatakan Barry Buzan, bahwa dalam konsep keamanan, selain isu politik dan militer, isu-isu non-tradisional seperti

kondisi sosial, ekonomi serta lingkungan juga menjadi hal yang penting dalam kasus ini.²⁶

1.6 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam meneliti diperlukan metode-metode ilmiah yang sifatnya dapat menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari sebuah pengetahuan yang ada.²⁷ Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang fokus pada makna dari sebuah kejadian atau peristiwa.²⁸ Pada penelitian yang bersifat kualitatif ini, penulis akan berfokus kepada data yang dapat menjelaskan pola maupun struktur peristiwa yang ada didalam penelitian ini.²⁹ Dengan menggunakan metode ini diharapkan penelitian yang bersifat mendalam.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder, dimana penulis menggunakan hasil penelitian dan tulisan dari peneliti lainnya. Pengumpulan data yang digunakan berbentuk studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca karya tulis ilmiah yang berbentuk buku maupun jurnal (daring maupun cetak) yang terkait dengan konflik yang terjadi di Perairan Selat Malaka. Dari sumber-sumber tersebut penulis dapat

²⁶ Barry Buzan, *People, State and Fear*, *Op cit* 363.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, Universitas Gajah Mada, (1969), 4.

²⁸ Sharan B. Merriam, *Qualitative Research a Guide to Design and Implementation*, Edisi ketiga (San Francisco: Joey-Bass, 2009), 3-4.

²⁹ Alan Bryman, *Social Research Methods 4th Edition* (New York: Oxford University Press, 2012), 380.

memahami informasi yang ada mengenai upaya Malaysia-Singapura-Indonesia dalam menanggulangi tindakan perompakan dan pembajakan yang ada di Perairan Selat Malaka.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II PEROMPAKAN DAN PEMBAJAKAN DI SELAT MALAKA DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA

Di bab dua, penulis akan memberikan data-data serta relasinya dengan teori yang dipakai, serta akan menjelaskan dinamika konflik yang terjadi di Selat Malaka yaitu Perompakan dan Pembajakan.

BAB III PERWUJUDAN PILAR-PILAR POROS MARITIM DALAM MENANGANI PERMASALAHAN PEROMPAKAN DAN PEMBAJAKAN DI SELAT MALAKA

Didalam bab ini akan dijelaskan bagaimana konsep-konsep yang dipakai dapat menganalisa permasalahan yang ada serta eksistensi kebijakan poros maritime

BAB IV KESIMPULAN

Merupakan bab terakhir yang berisi uraian singkat dari bab-bab sebelumnya, serta menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu **“bagaimana Indonesia menguatkan pilar-pilar poros maritim sebagai respon terhadap perompakan dan pembajakan di Selat Malaka?”**